

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN
METODE *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS KESEHATAN
HEWAN DAN PETERNAKAN BANDA ACEH
PADA TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**AZZAHRA PUTRI
NPM : 1802110118**



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akutansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

AZZAHRA PUTRI
NPM : 1802110118

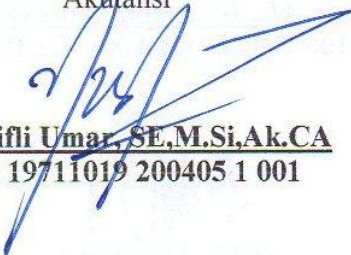
Dengan judul:

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE
VALUE FOR MONEY PADA DINAS KESEHATAN
HEWAN DAN PETERNAKAN BANDA ACEH
PADA TAHUN 2018-2020**

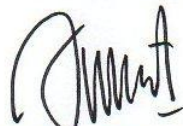
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akutansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA
NIK: 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Elviza, S.E., M.Si
NIK. 19840212 201112 2 001

Pembimbing II


M. Fahriansyah, S.E., M.Si
NIK. 19770403 200604 1 001

Mengetahui,
Dekan,


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, M.M
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX: 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akutansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

AZZAHRA PUTRI
NPM : 1802110118

Dengan judul:

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE
VALUE FOR MONEY PADA DINAS KESEHATAN
HEWAN DAN PETERNAKAN BANDA ACEH
PADA TAHUN 2018-2020**

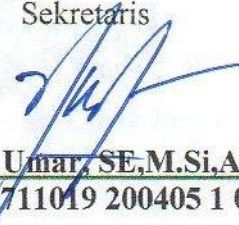
Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 27 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M. Si, MM
NIK: 19700408 199401 1 001

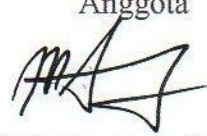
Sekretaris


H. Zulkifli Umar, SE, M. Si, Ak. CA
NIK: 19711019 200405 1 001

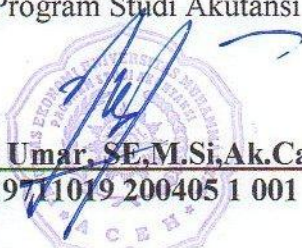
Anggota


Elviza, S.E., M.Si
NIK. 19840212 201112 2 001

Anggota


M. Fahriansyah, S.E., M.Si
NIK. 19770403 200604 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akutansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. Ca
NIK: 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 10 Maret 2022
Yang Menyatakan



Azzahra Putri

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Azzahra Putri

NPM : 1802110118

Program Studi : Akutansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN BANDA ACEH PADA TAHUN 2018-2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Azzahra Putri

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengukuran Kinerja Dengan menggunakan Metode *Value For Money* Pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh Pada Tahun 2018-2020”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh. Selanjutnya shalawat beserta salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, sebagai utusan Allah yang senantiasa berusaha memperbaiki akhlaq umat manusia menjadi insan yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan.

Meski tulisan ini telah dilakukan dengan maksimal, namun penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk membantu menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kemurahan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE,M.Si,MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Syamsidar, SE,M.Si,Ak. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE,M.Si,Ak,CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE,M.Si. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Ibu Elviza, SE,M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, M. Fahriansyah, SE. M.Si. Selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan arahan, wawasan dan pengetahuan kepada penulis dengan tulus hati.
8. Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan bantuan dan partisipasinya bagi penulis selama menjalankan kuliah hingga selesai.
9. Ayahanda Hasnawi, Ibunda Fikri Rastina, dan abang Arif Rahmat, Wahyu Purnama Aji, Muhammad Iqram yang selalu memberikan do'a, dorongan, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat penulis Sri, Namira, Winda, Rara, Wilda, Ruhil, Ola, Evi, Julia yang telah banyak membantu penulis.
11. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan, wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, bagi penulis khususnya dan umumnya bagi yang membaca skripsi ini.

Banda Aceh, 31 Januari 2022

Azzahra Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 7
2.1 Landasan Teoritis	7
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	7
2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.1.4 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.2 Kinerja Keuangan.....	9
2.1.3 Pengukuran Kinerja.....	11
2.1.4 Tujuan Pengukuran Kinerja	12
2.1.5 Manfaat Pengukuran Kinerja	13
2.1.6 Indikator Kinerja	13
2.2 Value For Money.....	14
2.2.1 Metode <i>Value For Money</i>	14
2.2.2 Manfaat <i>Value For Money</i>	15
2.2.3 Elemen <i>Value For Money</i>	16
2.2.4 Pengukuran <i>Value For Money</i>	16
2.2.4.1 Rasio Ekonomis.....	16
2.2.4.2 Rasio Efisiensi.....	17
2.2.4.3 Rasio Efektivitas.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.4 Kerangka pemikiran	22
 BAB III. METODE PENELITIAN	 25
3.1 Desain Penelitian	25
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	25
3.1.2 Tujuan penelitian.....	25
3.1.3 Jenis Penelitian.....	25
3.1.4 Horizon Waktu	25
3.1.5 Unit Analisis.....	26

3.2 Sumber Data	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data	26
3.4 Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh	30
4.1.1 Sejarah Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh	30
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh	31
4.1.3 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh	31
4.2 Hasil Penelitian	34
4.3 Pembahasan	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Anggaran Belanja dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh Tahun 2018-2020.....	4
2.1 Kriteria Rasio Ekonomi.....	17
2.2 Kriteria Rasio Efisiensi.....	18
2.3 Kriteria Rasio Efektivitas.....	19
2.4 Penelitian Selanjutnya.....	21
3.1 Kriteria Rasio Ekonomi.....	27
3.2 Kriteria Rasio Efisiensi	28
3.3 Kriteria Rasio Efektivitas	29
4.1 Rasio Ekonomi Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh.....	34
4.2 Rasio Efisiensi Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh.....	36
4.3 Rasio Efektivitas Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh...	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	24

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 2018.....	49
1.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 2019.....	56
1.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 2020.....	66

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN
METODE *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS KESEHATAN HEWAN
DAN PETERNAKAN BANDA ACEH PADA TAHUN 2018-2020**

AZZAHRA PUTRI
NPM : 1802110118

Pembimbing :1) Elviza, SE,M.Si
2) M. Fahriansyah, SE. M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh. Ditinjau dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh. Pada tahun 2018 tergolong cukup ekonomis dimana jumlah persentase berada di 80%-90%, pada tahun 2019-2020 tergolong kurang ekonomis dimana jumlah persentase berada di 60-80%, Rasio efisiensi pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh pada tahun 2018 cukup efisien dimana persentasenya berada pada 80-90%, tahun 2019-2020 tergolong efisien dimana persentase berada di 60%-80%. Rasio efektivitas pada tahun 2018 cukup efektif dimana persentasenya berada di 80-90%, pada tahun 2019-2020 dikatakan kurang efektif dimana persentase berada pada 60%-80%.

**Kata kunci : Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, *Value For Money* Dinas
Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh.**

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN
METODE *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS KESEHATAN HEWAN
DAN PETERNAKAN BANDA ACEH PADA TAHUN 2018-2020**

AZZAHRA PUTRI
NPM : 1802110118

Pembimbing :1) Elviza, SE,M.Si
2) M. Fahriansyah, SE. M.Si

ABSTRACT

This study aims to determine how the performance of the Department of Animal Health and Livestock in Banda Aceh. Judging from the economic aspect, efficiency, and effectiveness. The research method uses a quantitative descriptive approach with data collection techniques, namely documentation. The data used is secondary data in the form of a budget realization report at the Department of Animal Health and Livestock in Banda Aceh. In 2018 it is quite economical where the percentage is at 80%-90%, in 2019-2020 it is classified as less economical where the percentage is at 60-80%, the efficiency ratio at the Banda Aceh Animal Health and Livestock Service in 2018 is quite efficient where the percentage is at 80-90%, 2019-2020 is classified as efficient where the percentage is at 60%-80%. The effectiveness ratio in 2018 is quite effective where the percentage is at 80-90%, in 2019-2020 it is said to be less effective where the percentage is at 60%-80%.

Keywords: Economical, Efficiency, Effectiveness, Value For Money Service
Animal Health and Livestock Banda Aceh.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Kinerja instansi pemerintah menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik, masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan sumber dana, dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut diberlakukannya transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat dapat mengukur dan mengawasi kinerja serta pertanggungjawaban keuangan pemerintah sehingga dapat mencegah kecurangan yang terjadi dan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan akan tetapi mampu memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan kinerja adalah hasil dari kegiatan yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, keluaran adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilakukan untuk membantu pencapaian tujuan suatu program dan kebijakan, hasil merupakan suatu yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan program adalah penjabaran dari kebijakan.

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting pada suatu organisasi dan sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan yang baik dan tepat sasaran, Tujuan adanya Pengukuran ini untuk dapat membantu memperbaiki sektor pemerintah, digunakan untuk pengalokasian sumber daya pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan kinerja sektor publik. Sujarweni (2015:107)

Hasil pengukuran kinerja dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja, pembuatan laporan tersebut merupakan manifestasi dilakukannya akuntabilitas publik. Kinerja organisasi sektor publik bersifat multidimensional sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komperenshif, sifat *output* yang dihasilkan organisasi lebih banyak bersifat *intangibile*, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik, oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran kinerja non finansial.

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai.

Menurut Mardiasmo (2016:83) menyatakan bahwa *value for money* terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas tertentu pada harga terendah, efisiensi pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu, efektivitas hubungan antara *output* dengan tujuan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan mencapai target. *Value for money* merupakan inti pengukuran dari organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari *output* saja akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama agar mencapai kinerja pemerintahan yang sesungguhnya. *Input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. *Output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan, ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. *Outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu, seringkali di kaitkan dengan tujuan (*objective*) atau target yang dikehendaki.

Mahmudi (2016:12) menjelaskan bahwa tujuan masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money* yaitu ekonomis (hermat cermat) dalam pengadaan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam artian mencapai tujuan dan sasaran. Berikut ini data anggaran belanja dan laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh.

Tabel 1.1

Anggaran Belanja Dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Banda Aceh Tahun 2018-2020

No	Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Persen (%) Capaian Anggaran	Sisa
1	2018	Rp 148,920,586,375	Rp 127,083,083,970	85.34%	14,66%
2	2019	Rp 138,862,602,039	Rp 94,183,512,994	67.82%	32,18%
3	2020	Rp 75,782,073,560	Rp 58,464,80,151	77.15%	22,85%

Sumber: LRA Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan tahun (2018-2020)

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat dilihat dari anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh selama tahun anggaran 2018-2020 mengalami penurunan dimana tahun 2018 jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp.148,920,586,375 dan jumlah yang terealisasi sebesar Rp.127,083,083,970 dengan presentase 85,34%, pada tahun 2019 jumlah anggaran mengalami penurunan yang diberikan sebesar Rp.138,862,602,039 dan jumlah yang terealisasi sebesar Rp.94,183,512,994 dengan persentase 67,82%. Kemudian pada tahun terakhir 2020 mengalami penurunan anggaran kembali sebesar Rp.75,782,073,560 dan jumlah yang teralisasi sebesar Rp. 58,464,80,151 dengan persentase sebesar 77,15%. Hal ini dikarenakan terdapat anggaran yang tidak terealisasi dan nantinya dana tersebut akan dimasukkan kepada sisa hasil perhitungan anggaran (SILPA).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Banda Aceh Pada Tahun 2018-2020**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh ditinjau dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

1.3 Tujuan Penelitian

Maka yang jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh ditinjau dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Memberikan pemahaman terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik, dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dalam menerapkan ilmu khususnya mengenai akuntansi sektor publik.
2. Bagi Kesehatan Hewan dan Peternakan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi sekaligus umpan balik mengenai pengukuran kinerja pada Dinas Kesehatan

Hewan dan peternakan sehingga program/kegiatan di masa depan dapat berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah pengukuran kinerja berdasarkan konsep *value for money* yang terdiri dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh pada tahun 2018-2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya Bastian (2015). Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Wiratna (2015).

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang berguna untuk mengendalikan manajemen dan pertanggungjawaban Menurut wiratna (2015) tujuan akuntansi sektor publik meliputi :

1. *Management Control*, tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan /dianggarkan untuk sebuah organisasi.
2. *Accountability*, tujuan ini hampir sama dengan *management control* yaitu memberikan informasi yang berguna untuk manager sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sumber daya/bidang/divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana/anggaran publik.

Menurut Reniwijoyo (2016) menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan akuntansi sektor publik meliputi :

1. Memberikan informasi yang diperlukan guna mengelola secara efektif, efisien dan ekonomis atas sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer dapat melaporkan pelaksanaan dan tanggung jawab program secara efektif dan efisien dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan bagi pegawai pemerintah dapat melaporkan kepada publik(masyarakat) hasil aktivitas pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas

2.1.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2017) Ruang lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran yang terjadi. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi publik nirlaba lainnya. Jadi, proses

pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik.

2.1.1.4 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Halim (2016) menyebutkan karakteristik akuntansi sektor publik sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berorientasi laba.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca.
6. Motif mencari laba bukan merupakan orientasi utama. Karena orientasi utama adalah peningkatan mutu layanan ,sehingga laba bukan merupakan orientasi utama yang ingin dicapai sehingga tidak diadakan penghitungan dan pelaporan laba.
7. Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, dan kepemilikan tidak dibuktikan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbeliakan. Karena segala yang bersifat pribadi tidak ditemui dalam organisasi sektor publik. Sumber keuangan yang diberikan warga negara tidak secara langsung

berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya warga negara membayar pajak kepada pemerintah, warga negara tersebut tidak secara langsung memperoleh layanann dari pemerintah.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan penggambaran mengenai pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. suatu hasil yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu

berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Afandi (2018) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi .

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan kinerja adalah hasil dari kegiatan yang telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas terukur, keluaran adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan program dan kebijakan, hasil merupakan suatu yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan program adalah penjabaran dari kebijakan.

Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode tertentu yang berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sutrisno (2017) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi.

Kinerja merupakan sebuah usaha yang mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan laba yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Fahmi (2017) kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah sudah melaksanakan aturan

yang sudah ditetapkan, kinerja keuangan juga dapat diukur dengan menggunakan alat analisis dengan cara menghitung, mengukur, menginterpretasi, mengevaluasi dan menghasilkan keuntungan yang telah dilaksanakan pada periode tertentu.

Isna dan Ayu (2015) kinerja keuangan salah satu kinerja yang sangat penting untuk dikaji dengan diterapkannya kinerja berbasis semua pemerintahan diharuskan untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan dengan baik agar dapat mengurangi terjadinya pemborosan, sarang infisiensi, sumber kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak layak, kinerja keuangan yang baik dapat memberikan pencapaian pada tujuannya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan kinerja merupakan hasil yang diperoleh oleh suatu perusahaan apabila kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan maka kinerja tersebut dikatakan baik, kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan alat analisis dengan cara menghitung, mengukur, mengevaluasi, dan menghasilkan keuntungan pada periode tertentu.

2.1.3 Pengukuran Kinerja

Menurut Bintoro (2017) pengukuran kinerja merupakan suatu proses organisasi untuk mengukur, mengevaluasi, dan menilai kinerja secara tepat dan akurat. Hasil pengukuran kinerja juga memberikan informasi mengenai pencapaian dalam menjalankan strategi pemerintah. Apabila hasil kerja tersebut mengalami kendala dalam menjalankan strategi yang ditetapkan sebelumnya maka dapat memperbaiki berbagai sisi dari kinerja yang diukur.

Menurut Kasmir (2017) pengukuran kinerja merupakan salah satu sistem yang dilakukan secara periodik untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja juga diperlukan untuk mengetahui tingkat tinggi rendahnya kinerja suatu organisasi terkait dengan pencapaian visi dan misi organisasi suatu pemerintahan.

Pengukuran kinerja meliputi indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Menurut Mahmudi (2019) pengukuran kinerja merupakan suatu proses terhadap kemajuan sasaran yang ditentukan termasuk informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan yang memberikan manfaat untuk memperbaiki kinerja, dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tautan akuntabilitas publik.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses organisasi untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran. dengan adanya pengukuran ini dapat diketahui tingkat tinggi rendahnya kinerja dalam suatu organisasi dan dapat memberikan informasi kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat.

2.1.4 Tujuan Pengukuran Kinerja

Adanya tujuan yang jelas, maka dapat membantu kemajuan kinerja di masa yang akan datang. Menurut Sujarweni (2015) tujuan pengukuran kinerja pada sektor pemerintahan yaitu:

1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah yang berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
2. Digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan kinerja sektor publik.
4. Untuk mengukur kinerja finansial maupun non finansial secara berimbang.
5. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).

2.1.5 Manfaat Pengukuran Kinerja

Dengan adanya pengukuran kinerja dapat memberikan banyak manfaat terhadap kinerja organisasi Pemerintahan. Menurut Mahsun (2016) beberapa manfaat dalam pengukuran kinerja sektor pemerintahan diantaranya:

1. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan.
2. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
3. Mengetahui sejauh mana perkembangan organisasi yang sudah dicapai dalam dalam setiap periode tertentu.
4. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.6 Indikator Kinerja

Menurut Bastian (2016) indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah dilaksanakan dengan harus memperhitungkan indikator yaitu:

1. Indikator masukan (*inputs*) segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dapat terlaksana. indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*outputs*) merupakan suatu kegiatan yang diharapkan langsung dicapai dapat berupa fisik maupun non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) pengaruh yang dapat ditimbulkan baik

positif maupun negatif berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.2 *Value for Money*

2.2.1 *Metode Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2016) *value for money* merupakan suatu konsep penilaian kinerja organisasi sektor publik yang dinilai berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja tingkat keberhasilan yang dimaksud mengacu 3 (tiga) elemen utama yaitu ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas tertentu pada harga terendah, efisiensi pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu, efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, efektivitas adalah perbandingan *outcome* dan *output*, melalui elemen ini bisa didapatkan informasi dana yang telah dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu.

Menurut Abdul (2015), *value for money* mengandung sebuah arti penghargaan terhadap nilai uang oleh karena itu setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan seperlunya. konsep ini jugak merupakan inti dari pengukuran kinerja organisasi pemerintahan dan suatu organisasi pemerintahan tidak hanya menilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi jugak harus meninjau *input*, *output*, dan *income* secara bersama-sama sehingga benar-benar menggambarkan kinerja pemerintah yang sesungguhnya. *Input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. *Output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan, ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. *Outcome*

merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu, sering kali dikaitkan dengan tujuan (*objective*) atau target yang dikehendaki.

Menurut Mahmudi (2016:12) pengukuran *value for money* dilakukan dengan indikator ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya efisien (berdaya guna) dalam arti pemakaiannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam artian mencapai tujuan dan sasaran.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja organisasi pemerintahan tidak hanya dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi juga harus meninjau *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama sehingga benar-benar menggambarkan kinerja pemerintah yang sesungguhnya. pengukuran kinerja dengan indikator ekonomis (hemat cermat), efisiensi (berdaya guna), dan efektivitas (berhasil guna).

2.2.2 Manfaat Value For Money

Manfaat pada organisasi sektor publik dapat diambil dengan adanya implementasi konsep *Value for money*. Mardiasmo (2016:88) diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
2. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat tujuan.
3. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*publik costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan pemerintahan
Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*.

2.2.3 Elemen *Value For Money*

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Mardiasmo (2016:83) dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah:

1. Elemen ekonomi

Merupakan pemerolehan sumber daya (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Elemen efisiensi

Merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu., dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* yang serendah-rendahnya.

3. Elemen efektivitas

Merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, suatu organisasi dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi target yang diharapkan (*spending wisely*).

2.2.4 Pengukuran *Value For Money*

Pengukuran *value for money* yaitu aspek ekonomi, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas. Halim (2016) ketiga langkah pengukuran tersebut yaitu:

2.2.4.1 Rasio Ekonomis

Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input value* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil rasio ekonomi maka, kriteria rasio ekonomi menurut Kepemendagri No.600.900.327 Tahun 1996 tentang pendoman penilaian dan kinerja keuangan adalah:

Tabel 2.1
Kriteria Rasio Ekonomi

No	Persentase	Penilaian
1	>100%	Sangat Ekonomis
2	90%-100%	Ekonomis
3	80%-90%	Cukup Ekonomis
4	60%-80%	Kurang Ekonomis
5	<60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Kepemendagri No.600.900.327 Tahun 1996

2.2.4.2 Rasio Efisiensi

Efisiensi menggambarkan pencapaian *Output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai Kepemendagri No.600.900.327 Tahun 1996 tentang pendoman penilaian dan kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Efisiensi

No	Persentase	Penilaian
1	>100%	Tidak Efisien
2	90% –100%	Kurang Efisien
3	80%– 90%	Cukup Efisien
4	60% –80%	Efisien
5	< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepemendagri No.600.900.327 Tahun 1996

Apabila hasil perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran mencapai kurang dari 60% maka anggaran dapat dikatakan sangat efisien dan apabila hasil perbandingan antara realisasi anggaran langsung dengan realisasi anggaran diatas 100% maka anggaran dikatakan tidak efisien.

2.2.4.3 Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{output}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai Kepemendagri No.600.900.327 Tahun 1996 tentang pendoman penilaian dan kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Rasio Efektivitas

No	Persentase	Penilaian
1	>100%	Sangat Efektif
2	90% – 100%	Efektif
3	80% – 90%	Cukup Efektif
4	60% – 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Apabila perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran mencapai lebih dari 100% maka anggaran dapat dikatakan sangat efektif dan apabila hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran di bawah 60% maka anggaran dikatakan tidak efektif. Dengan kata lain semakin besar tingkat persentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat persentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

2.3 Penelitian Terdahulu

Indrayani dan Khairunnisa (2018) dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan konsep *Value for money* pada pemerintah Kota Lhoksumawe”. Menunjukkan bahwa kinerja pemerintah tahun 2014-2016 menunjukkan rasio ekonomis, pada tahun 2014 rasio efisiensi cukup baik, dan mengalami peningkatan tahun 2015 sebesar 105,71% dan tahun 2016 turun menjadi 97,95%. Rasio efektivitas periode 2014-2016 dengan nilai rasio sebesar 96,53%, 86,65%, 76,98% yang bernilai kurang dari 100% bahwa kinerja dinilai tidak efektif.

Isna Ardila (2015) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan *Value for money* pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2010 sampai dengan 2013, mengalami peningkatan sebesar 102,27% hal ini menunjukkan pemanfaatan belanja anggaran belum memenuhi standar ekonomis. Rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 107,69% berada pada 100% menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi menyebabkan rasio tidak memenuhi standar efisien. Sedangkan rasio efektivitas mengalami peningkatan sebesar 72,05% yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa yang diberikan Pengadilan Negeri Tinggi sudah terpenuhi.

Khikmah dan Alayyal (2017) meneliti tentang “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep *Value for money*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomis dari tahun 2009-2013 cenderung tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Apabila dilihat dari rasio efisiensi maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lamongan cukup efisien artinya pemerintah mampu mengelola keuangan daerah menggunakan sumber daya dengan tingkat tertentu untuk dapat mencapai output yang optimum. Perhitungan rasio efektivitas menunjukkan hasil lebih 100% dapat dikatakan efektif artinya bahwa pemerintah dalam menentukan target telah sukses. Dapat dilihat pada tabel 2.1 penelitian sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Selanjutnya

No	Judul Penelitian/ Nama/ Tahun	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan konsep <i>Value for money</i> pada pemerintah Kota Lhoksumawe”. Menunjukkan bahwa kinerja pemerintah tahun 2014-2016 Indrayani dan Khairunnisa (2018)	Deskriptif kuantitatif	Menunjukkan bahwa kinerja pemerintah tahun 2014-2016 menunjukkan rasio ekonomis, pada tahun 2014 rasio efisiensi cukup baik, dan mengalami peningkatan tahun 2015 sebesar 105,71% dan tahun 2016 turun menjadi 97,95%. Rasio efektivitas periode 2014-2016 dengan nilai rasio sebesar 96,53%, 86,65%, 76,98% yang bernilai kurang dari 100% menunjukkan bahwa kinerja dinilai tidak efektif.	• Konsep <i>Value For Money</i> • Rasio ekonomis • Rasio efisiensi • Rasio efektivitas	• Tempat Penelitian • Waktu penelitian • Tahun penelitian
2	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan <i>Value for money</i> pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Isna Ardila (2015)	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2010 sampai dengan 2013, mengalami peningkatan sebesar 102.27% hal ini menunjukkan pemanfaatan belanja anggaran belum memenuhi standar ekonomis. Rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 107,69% berada pada 100% menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi menyebabkan rasio tidak memenuhi standar efisien. Sedangkan rasio efektivitas mengalami peningkatan sebesar 72,05% yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa yang diberikan Pengadilan Negeri Tinggi sudah terpenuhi.	• Konsep <i>Value For Money</i> • Rasio ekonomis • Rasio efisiensi • Rasio efektivitas	• Tempat Penelitian • Waktu penelitian • Tahun penelitian

Tabel 2.1 Lanjutan

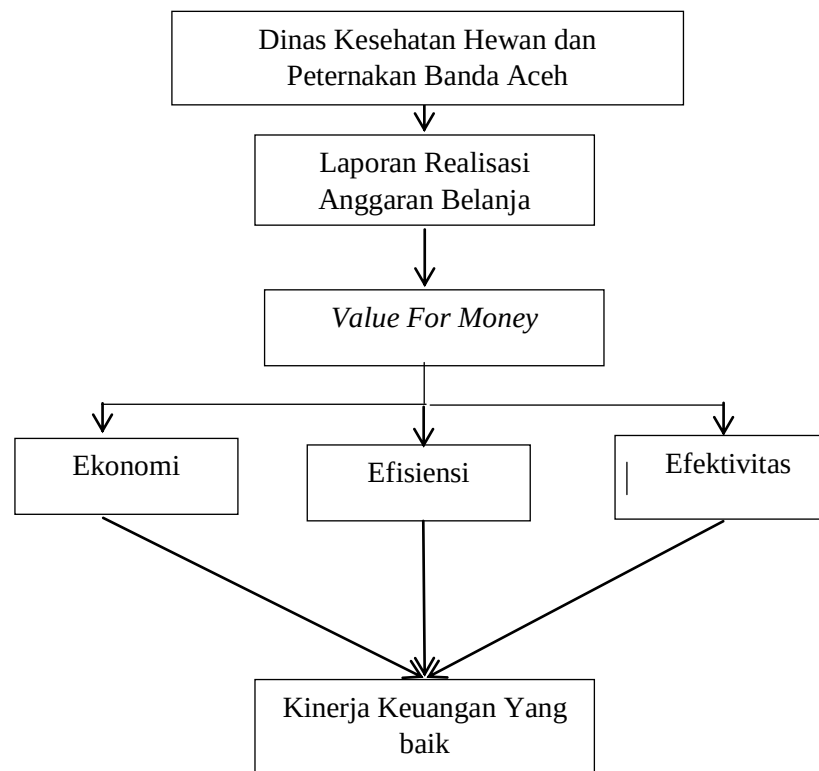
No	Judul Penelitian/ Nama/ Tahun	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep <i>Value for money</i> ". Khikmah dan Alayyal (2017)	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomis dari tahun 2009-2013 cenderung tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Apabila dilihat dari rasio efisiensi maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lamongan cukup efisien artinya pemerintah mampu mengelola keuangan daerah menggunakan sumber daya dengan tingkat tertentu untuk dapat mencapai output yang optimum. Perhitungan rasio efektivitas menunjukkan hasil lebih 100% dapat dikatakan efektif artinya bahwa pemerintah dalam menentukan target telah sukses	• Konsep <i>Value For Money</i> • Rasio ekonomis • Rasio efisiensi • Rasio efektivitas	• Tempat Penelitian • Waktu penelitian • Tahun penelitian

2.3 Kerangka Pemikiran

Suatu organisasi memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk membantu dan menilai pencapaian suatu strategi, pengukuran kinerja tidak hanya ditinjau dari ukuran yang bersifat finansial saja tetapi juga bersifat nonfinansial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja organisasi yang bersifat multidimensional menyebabkan tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu *output* yang dihasilkan oleh organisasi bersifat *intangible* sehingga perlu adanya ukuran nonfinansial agar dapat menghasilkan besarnya *output*.

Value for money merupakan alat untuk mengukur dan menilai apakah suatu organisasi pemerintahan telah memperoleh tujuan yang diharapkan konsep *value for money* terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas tertentu pada harga terendah. Efisiensi pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu dan efektivitas Merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan merupakan perbandingan *outcome* dan *output*.

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh sebagai salah satu organisasi yang sangat memerlukan pengukuran kinerja untuk mengetahui keseluruhan kinerja dalam melaksanakan kerjanya. Pengukuran kinerja dengan metode *Value for money* yang dinilai dari sisi *input*, *output*, dan *outcome* dijadikan indikator dalam pengukuran ini sehingga dapat diketahui tingkat kinerja yang ditinjau dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan. oleh karena itu untuk melihat pengukuran kinerja dengan metode *value for money* pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh maka dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Menurut Sugiyono (2017) desain penelitian merupakan suatu strategi dalam penelitian yang digunakan untuk perancangan dan pengumpulan data serta untuk mendefinisikan struktur penelitian yang akan dilaksanakan, terdapat 5 (lima) aspek desain penelitian dalam penelitian ini.

3.1.1 Lokasi dan objek penelitian

Penelitian ini pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan yang berlokasi di jalan Mr.Muhammad Hasan No.147 Banda Aceh, yang menjadi objek penelitian adalah laporan realisasi anggaran pada tahun 2018-2020.

3.1.2 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kinerja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan ditinjau dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

3.1.3 Jenis penelitian

Analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka, perhitungan menggunakan teori yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dengan menghitung dan menyajikan kinerja menggunakan metode *value for money* pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh.

3.1.4 Horizon waktu

Horizon waktu yang digunakan adalah *time series*, data yang dikumpulkan

dari waktu ke waktu secara berurutan pada satu objek yang sama pada setiap periode.

3.1.5 Unit analisis

Untuk analisis penelitian ini adalah aspek-aspek kinerja yang terdiri dari aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan wawancara langsung instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu dokumen berupa data laporan realisasi anggaran pada tahun 2018-2020.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode diantaranya:

1. Metode wawancara

Dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung dengan kepala keuangan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan untuk memperoleh informasi mengenai laporan realisasi anggaran pada tahun 2018-2020.

2. Metode dokumentasi

Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam laporan, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan pada tahun 2018-2020.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif yang menyajikan dan menghitung kinerja menggunakan metode *value for money* pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Halim (2016) diantaranya:

1. Rasio Ekonomis

Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan *input value* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil rasio ekonomis maka, kriteria rasio ekonomi menurut Kepemendagri No.600.900.327 Tahun 1996 tentang pendoman penilaian dan kinerja keuangan adalah:

Tabel 3.1
Kriteria Rasio Ekonomis

No	Persentase	Penilaian
1	>100%	Sangat Ekonomis
2	90%-100%	Ekonomis
3	80%-90%	Cukup Ekonomis
4	60%-80%	Kurang Ekonomis
5	<60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Kepemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk hasil yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung analisis efisiensi anggaran adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai Kepemendagri No.600.900.327 Tahun 1996 tentang pendoman penilaian dan kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Rasio Efisiensi

No	Persentase	Penilaian
1	>100%	Tidak Efisien
2	90% – 100%	Kurang Efisien
3	80% – 90%	Cukup Efisien
4	60% – 80%	Efisien
5	< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepemendagri No.600.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan rumus diatas, apabila hasil perbandingan antara realisasi belanja langsung dengan realisasi anggaran mencapai kurang dari 60%, maka anggaran dapat dikatakan sangat efisien dan apabila hasil perbandingan antara realisasi anggaran di atas 100% maka anggaran dapat dikatakan tidak efisien. Dengan kata lain semakin rendah tingkat persentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan semakin efisien, begitu pula sebaliknya semakin tinggi tingkat persentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien

3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung analisis efektivitas anggaran adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai Kepemendagri No.600.900.327 Tahun 1996 tentang pendoman penilaian dan kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Rasio Efektivitas

No	Persentase	Penilaian
1	>100%	Sangat Efektif
2	90% – 100%	Efektif
3	80% – 90%	Cukup Efektif
4	60% – 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepemendagri No.600.900.327 Tahun 1996

Apabila perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran mencapai lebih dari 100% maka anggaran dapat dikatakan sangat efektif dan apabila hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran di bawah 60% maka anggaran dikatakan tidak efektif. Dengan kata lain semakin besar tingkat persentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat persentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah Aceh dibidang peternakan. Dipimpin oleh seorang kepala dinas yang secara hirarkhis berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Untuk itu pada tanggal 29 desember 2016 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 127 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kelola kerja dinas kesehatan hewan dan peternakan Banda Aceh.

Perangkat daerah ini mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi masyarakat dalam hal pencegahan/pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak, serta penyediaan kesehatan produk ternak yang aman, sehat, utuh dan halal di Aceh. Dinas kesehatan hewan dan peternakan Banda Aceh selain berstatus perangkat daerah, juga masih memiliki hubungan vertikal dengan pemerintah pusat melalui kementerian pertanian, sehingga program dan kebijakan juga mengacu kepada rencana keistimewaan (RKI) dari pemerintah pusat.

Dalam pembiayaan program/kegiatan dan rencana anggaran pembangunan perekonomian aceh. Selama kurun waktu 2017-2022 pembangunan peternakan diarahkan pada upaya-upaya sevelisasi pembangunan peternakan dalam rangka

mereposisi kembali kedudukan dan peran penting peternakan secara proposional dalam konteks pembangunan daerah pembangunan pertanian nasional.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh

1. Visi

Menjamin terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan dari sektor peternakan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan peternak melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil peternakan.

2. Misi

- a. Meningkatkan produktivitas daging dan telur serta kemudahan aksesnya.
- b. Penyediaan sarana pendukung bagi nilai yambahan terhadap produk peternakan.
- c. Menjamin produk peternakan yang ASUH.
- d. Meningkatkan kesejahteraan peternakan yang tangguh dan berkelanjutan.

4.1.3 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh nomor 127 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh lembaga teknis dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh Terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak
4. Bidang Pakan
5. Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner
6. Bidang Pengelolaan dan pemasaran Hasil
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka pelaksanaan pasal 3 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, lembaga Teknis Daerah dan Lembaga daerah Provinsi Aceh,

dipandang perlu menata kembali susunan organisasi dan tata kerja UPTD. Dalam peraturan gubernur susunan organisasi dan tata kerja UPTD terdiri dari:

1. UPTD Laboratorium Veteriner
 2. UPTD Inseminasi Buaran dan Inkubator
 3. UPTD Balai ternak Non Ruminansia (BTNR)
- a. Sekretriati terdiri dari:
 1. Sub bagian program, informasi dan hubungan masyarakat
 2. Sub bagian keuangan dan pengelolaan asset
 3. Sub bagian hukum kepegawaian dan umum
 - b. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak
 1. Seksi standarisasi dan mutu ternak
 2. Seksi ruminansia potong
 3. Seksi inseminasi buatan
 - c. Bidang Pangan
 1. Seksi bahan pakan
 2. Seksi pakan hijauan dan pakan olahan
 3. Seksi mutu, keamanan dan pendaftaran pakan
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner
 1. Seksi pengamatan penyakit
 2. Seksi pencegahan dan pemerantasan penyakit hewan
 3. Seksi perlindungan hewan dan kesehatan masyarakat veterine
 - e. Bidang usaha, pegelolaan dan pemasaran hasil peternakan
 1. Seksi pengolahan
 2. Seksi investasi dsn pengembangan usaha
 3. Seksi pemasaran

4.2 Hasil Penelitian

1. Rasio Ekonomis

Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar.

Rasio ekonomis merupakan pemerolehan sumber daya (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil dari pada target anggaran dan dapat mencapai *output* (keluaran) yang maksimal. Perhitungan digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan ke dalam satuan moneter dan menentukan harga *input* yang sesungguhnya diperlukan.

Untuk mendeskripsikan pengukuran kinerja dari elemen ekonomi, maka disajikan deskripsi data dari program yang terdapat pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh periode tahun 2018-2020 pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rasio Ekonomis Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh

Tahun	Rasio Ekonomis (%)		
	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Ekonomis
2018	148,920,586,375	127,083,083,970	85.34
2019	138,862,602,039	94,183,512,994	67.82
2020	75,782,073,560	58,464,860,151	77.15

Sumber : Data Diolah 2022

Ekonomis anggaran tahun 2018:

$$2018 = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 2018 &= \frac{\text{Rp } 127,083,083,970}{\text{Rp } 148,920,586,375} \times 100\% \\ &= 85.34\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 jumlah realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh sebesar Rp 127,083,083,970 dan target anggaran belanja Rp 148,920,586,375 hal ini menunjukkan rasio ekonomis sebesar 85.34%. Rasio ekonomis antara 80-90% dapat dikatakan cukup ekonomis. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh menunjukkan kinerja yang cukup ekonomis.

$$\begin{aligned} 2019 &= \frac{\text{Rp } 94,183,512,994}{\text{Rp } 138,862,602,039} \times 100\% \\ &= 67.82\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 jumlah realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh sebesar Rp 94,183,512,994 dan target anggaran belanja Rp 138,862,602,039 hal ini menunjukkan rasio ekonomis sebesar 67.82%. Antara 60-80% dapat dikatakan kurang ekonomis. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh menunjukkan kinerja yang kurang ekonomis.

$$\begin{aligned} 2020 &= \frac{\text{Rp } 58,464,860,151}{\text{Rp } 75,782,073,560} \times 100\% \\ &= 77.15\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 jumlah realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh Rp 58,464,860,151 dan target anggaran belanja Rp 75,782,073,560 hal ini menunjukkan rasio ekonomis sebesar 77,15%. Rasio ekonomis antara 60-80% dapat dikatakan kurang ekonomis. Hal ini berarti kinerja anggaran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh menunjukkan kinerja yang kurang ekonomis.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* (keluaran) yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan, maka semakin rendah efisiensi suatu organisasi maka suatu kegiatan/program dikatakan lebih efisien.

Data *input* dan *output* dalam penelitian ini diperoleh dari data pencapaian Realisasi Keuangan yang terdapat di LAKIP Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh.

Untuk mendeskripsikan pengukuran kinerja dari elemen efisiensi, maka disajikan deskripsi data dari program yang terdapat pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh periode tahun 2018-2020 pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Rasio Efisiensi Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh

Tahun	Rasio Efisiensi (%)		
	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Efisiensi
2018	127,083,083,970	107,268,254,542	84.40
2019	94,183,512,994	72,663,612,795	77.15
2020	58,464,860,151	36,821,334,745	62.98

Sumber : Data Diolah 2022

Efisiensi anggaran tahun 2018:

$$\begin{aligned}
 2018 &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\
 2018 &= \frac{\text{Rp } 107,268,254,542}{\text{Rp } 127,083,083,970} \times 100\% \\
 &= 84.40\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 jumlah realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh sebesar Rp 107,268,254,542 dan realisasi anggaran Rp 127,083,083,970 hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 84.40%. Rasio efisiensi antara 80% - 90% dapat dikatakan cukup efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh menunjukkan kinerja yang cukup efisien.

$$\begin{aligned}
 2019 &= \frac{\text{Rp } 72,663,612,795}{\text{Rp } 94,183,512,994} \times 100\% \\
 &= 77.15\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 jumlah realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh sebesar Rp 72,663,612,795 dan realisasi anggaran Rp 94,183,512,994 hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 77.15%. Rasio efisiensi antara 60% - 80% dapat dikatakan efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh menunjukkan kinerja yang efisien.

$$\begin{aligned}
 2020 &= \frac{\text{Rp } 36,821,334,745}{\text{Rp } 58,464,860,151} \times 100\%
 \end{aligned}$$

= 62.98%

Pada tahun 2020 jumlah realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh sebesar Rp 36,821,334,745 dan realisasi anggaran Rp 58,464,860,151 hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 62.98% Rasio efisiensi 60% - 80% dapat dikatakan efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh menunjukkan kinerja yang efisien.

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya adalah tingkat pencapaian hasil program atau kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka suatu kegiatan/ program dikatakan lebih efektif

Untuk mendeskripsikan pengukuran kinerja dari elemen efektivitas, maka disajikan deskripsi data dari program yang terdapat pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh periode tahun 2018-2020 pada tabel 4.1

Tabel 4.3
Rasio Efektivitas Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh

Tahun	Rasio Efektivitas (%)		
	Target Anggaran	Realisasi Anggaran Belanja	Efektivitas
2018	148,920,586,375	127,083,083,970	85.34%
2019	138,862,602,039	94,183,512,994	67.82%
2020	75,782,073,560	58,464,860,151	77.15%

Sumber : Data Diolah 2022

Efektivitas anggaran tahun 2018:

$$\begin{aligned}
 2018 &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\
 2018 &= \frac{\text{Rp. 127,083,083,970}}{\text{Rp. 148,920,586,375}} \times 100\% \\
 &= 85.34\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 jumlah realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh sebesar Rp. 127,083,083,970 dan target anggaran belanja Rp.148,920,586,375 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 85.34%. Rasio efektivitas antara 80% - 90% dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh menunjukkan kinerja yang cukup baik.

$$\begin{aligned}
 2019 &= \frac{\text{Rp 94,183,512,994}}{\text{Rp 138,862,602,039}} \times 100\% \\
 &= 67.82\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 jumlah realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh sebesar Rp 94,183,512,994 dan target anggaran belanja Rp 138,862,606,039 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 67.82%. Rasio efektivitas antara 60% - 80% dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh menunjukkan kinerja yang sangat kurang baik.

$$2020 = \frac{\text{Rp 58,464,860,151}}{\quad} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 75,782,073,560 \\ & = 77.15 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 jumlah realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh sebesar Rp 58,464,850,151 dan target anggaran belanja Rp 75,782,073,560 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 77.15%. Rasio efektivitas antara 60% - 80% dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh menunjukkan kinerja yang kurang baik.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh periode tahun 2018-2020 menggunakan metode *value for money*. Metode *value for money* ini terbagi menjadi tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, efektivitas. Berdasarkan hasil analisis data, maka hasil pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis

Pengukuran ekonomis bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh periode tahun 2018- 2020 dalam memperoleh dan mengelola sumber daya (*input*) yang dibutuhkan agar dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Keekonomian suatu kegiatan tidak hanya dilihat dari besarnya penghematan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh, tetapi juga harus mempertimbangkan keluaran (*output*) yang dihasilkan. Penghematan menjadi berkurang maknanya

Berdasarkan hasil analisis data atas pengukuran rasio ekonomis terhadap program kerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh dapat diketahui bahwa telah memenuhi elemen ekonomis. Hal ini dapat dilihat dari total anggaran yang disediakan tiap tahunnya, tidak habis terpakai dalam memenuhi seluruh program kerja setiap tahunnya. Pada tahun 2018 persentase rasio ekonomis sebesar 85.34% berada di kategori cukup ekonomis. Pada tahun 2019 persentase rasio ekonomis sebesar 67.82% berada di kategori kurang ekonomis. Pada tahun 2020 persentase rasio ekonomis sebesar 77.18% berada di kurang ekonomis.

Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Tingkat ekonomis sebuah anggaran bisa dilihat dari berapa persentase tingkat pencapaian. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya (Andriani, 2012). Rasio ekonomis atau perubahan biaya dikatakan baik apabila besarnya tingkat pembelanjaan yang direalisasikan lebih rendah dari yang sudah dianggarkan.

Isna Ardila (2015) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan *Value for money* pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2010 sampai dengan 2013, mengalami peningkatan sebesar 102.27% hal ini menunjukkan pemanfaatan belanja anggaran belum memenuhi standar ekonomis. Rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 107,69% berada pada 100% menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi menyebabkan rasio tidak memenuhi standar efisien. Sedangkan rasio efektivitas

mengalami peningkatan sebesar 72,05% yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa yang diberikan Pengadilan Negeri Tinggi sudah terpenuhi

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang di hasilkan dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*)

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi (*method operation*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang Pada tahun 2018 rasio efisiensi sebesar 84.40%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 77.15%, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar 62.98%. Yang berarti bahwa kinerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh pada tahun 2018 dinyatakan cukup efisien. Sedangkan pada tahun 2019 rasio efisiensi berada di kategori efisien. Kemudian Tahun 2020 berada di kategori efisien.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrayani dan Khairunnisa (2018) dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan konsep *Value for money* pada pemerintah Kota Lhoksumawe”. Menunjukkan bahwa kinerja pemerintah tahun 2014-2016 menunjukkan rasio ekonomis, pada tahun 2014 rasio efisiensi cukup baik, dan mengalami peningkatan tahun 2015 sebesar 105,71% dan tahun 2016 turun menjadi 97,95%. Rasio

efektivitas periode 2014-2016 dengan nilai rasio sebesar 96,53%, 86,65%, 76,98% yang bernilai kurang dari 100% bahwa kinerja dinilai tidak efektif.

3. Rasio Efektivitas

Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh dalam mencapai tujuan atau target kebijakan dari suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah pembahasan hasil penelitian dari pengukuran efektivitas berdasarkan program kerja yang diteliti.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan, tingkat efektifitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan realisasi anggaran dengan anggaran pendapatan (penerimaan) dan presentase tingkat pencapaiannya (Putra, 2014).

Dapat di ketahui bahwa pada tahun pengamatan mulai 2018-2020 dengan nilai rasio 85.35% dimana berada dikategori cukup efektif. Selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 67.82 dimana berada di kategori kurang efektif. Selanjutnya pada tahun 2020 jumlah persentase rasio sebesar 77.15% dimana berada di kategori kurang efektif.

Khikmah dan Alayyal (2017) meneliti tentang “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep *Value for money*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomis dari tahun 2009-2013 cenderung tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Apabila dilihat dari rasio efisiensi maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lamongan cukup efisien artinya pemerintah mampu mengelola keuangan daerah menggunakan sumber daya dengan tingkat tertentu untuk dapat mencapai output yang optimum. Perhitungan rasio efektivitas menunjukkan hasil lebih 100% dapat dikatakan efektif artinya bahwa pemerintah dalam menentukan target telah sukses.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh ditinjau dari rasio ekonomis sudah tergolong cukup ekonomis hal ini pada tahun 2018 jumlah persentase rasio sebesar 85.34% dan tergolong cukup ekonomis. Pada tahun 2019 jumlah persentase rasio sebesar 67,82% dan termasuk kedalam kategori kurang ekonomis. Dan pada tahun 2020 rasio ekonomis sebesar 77,15% dimana jumlah persentasenya berada di kategori kurang ekonomis.
2. Rasio Efisiensi Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh pada tahun 2018 jumlah persentase rasio sebesar 84.40% dan tergolong cukup efisien. Pada tahun 2019 jumlah persentase rasio sebesar 77.15% dan termasuk ke dalam kategori efisien. Dan tahun 2020 rasio efisiensi sebesar 62.98% dimana jumlah persentasenya berada di katagori efisien.
3. Rasio Efektivitas Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh pada tahun 2018 jumlah persentase rasio sebesar 85.34% dan tergolong cukup efektif. Pada tahun 2019 jumlah persentase rasio sebesar 67.82% dan termasuk ke dalam kategori kurang efektif. Dan pada tahun 2020

rasio efektivitas sebesar 77,15% dimana jumlah persentasenya berada di kategori kurang efektif.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk kebaikan dan kemajuan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh, Yaitu:

1. Hendaknya Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh melakukan penghematan akan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Sehingga kinerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh dari segi ekonomis dapat mempertahankan kinerjanya dari tahun ke tahun berikutnya.
2. Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh diharapkan dapat menghasilkan output yang lebih. Penggunaan anggaran yang tidak melebihi dari yang telah ditetapkan bukan merupakan satu-satunya patokan penilaian kinerja melainkan harus dibandingkan dengan *output* yang telah dihasilkan.
3. Mengingat pentingnya suatu ekonomi, efektivitas dan efisiensi dalam sebuah perusahaan, maka sebaiknya anggaran dan program disusun secara teliti dan sebaiknya dilakukan secara seksama sehingga benar-benar menjadi pedoman kerja.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim, (2016), *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Abdul, Halim dan Syam Kususfi, (2015) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta, Salemba Empat.
- Afandi. (2018). *Manajemen sumber daya manusia* (Teori, Konsep, dan Indikator). Nusa Media. Yogyakarta.
- Andriani. (2012) Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2015-2018. *E-Juornal*. Tahun 2017.
- Ardila, Isna.(2015). “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan *Value For Money* Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Vol 15 No.
- Bastian (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Edisi Empat. Bandung
- Bastian, Indra. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3, Jakarta : Erlangga.
- Bastian. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Edisi Tiga. Bandung.
- Bintoro dan Daryanto. (2017). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fahmi, Irham. (2016) . *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. (Edisi 10). Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi 3 Cet 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV . BPFE:Yogyakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Reniwijoyo, (2016). “Analisis Efektivitas dan Efisiensi anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten

Kebumen” *Journal of Chemical Information and Modeling* lib.STIE
Putrabangsa ac.id

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :
Alfabeta, CV.

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru
Press.

Sutrisno, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana.

Wiratna, (2015). Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran Dalam Prosedur
Anggaran: Pengujian Kontijensi Matching. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
Vol. 10 No. 2. November.